

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Sejarah, dan Aliran Feminisme

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari *mainstream* kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Pembahasan mengenai feminisme dalam penelitian ini akan diarahkan pada pembahasan mengenai pengertian, sejarah, dan aliran-aliran feminisme; feminisme dalam sastra, dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

2.1.1 Pengertian Feminisme

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya (Fakih, 2007:81). Berdasarkan asumsi

tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan.

Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan membuka cakrawala masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.

Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi sehingga penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan harus diakhiri. Selain itu, gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Harsono dalam Mustaqim (2008:84) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini. Mustaqim (2008:85) mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi

dan subordinasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bashin dan Khan dalam Mustaqim (2008:4) mengatakan bahwa feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi.

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme (woman)*, perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah), *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis dan cultural). Sementara itu, *masculine-feminine* mengacu kepada jenis kelamin atau gender sehingga *he* dan *she* (Selden dalam Sugihastuti, 2000:32)

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2007:186).

Teori feminisme memperlihatkan dua perbedaan mendasar dalam melihat perempuan dan laki-laki. Ungkapan *male-female* yang memperlihatkan aspek biologis sebagai hakikat alamiah, kodrati. Adapun ungkapan *masculine-feminine* merupakan aspek perbedaan psikologis dan kultural (Ratna, 2002:184). Kaum feminis radikal-kultural menyatakan bahwa perbedaan seks/gender mengalir bukan semata-mata dari faktor biologis, melainkan juga dari sosialisasi atau sejarah keseluruhan menjadi perempuan di dalam masyarakat yang patriarkhal (Tong, 2008:71). Simon de Beauvoir menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkhal, perempuan ditempatkan sebagai yang Lain atau Liyan, sebagai manusia kelas dua (*deuxime sexe*) yang lebih rendah menurut kodratnya (Selden dalam Muslikhati, 2004:37). Kedudukan sebagai Liyan mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan (Cavallaro, 2001:202).

Masyarakat patriarkhal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar untuk perempuan membangun serangkaian identitas dan perilaku maskulin dan feminine yang diberlakukan untuk memperdayakan laki-laki di satu sisi dan melemahkan di sisi lain. Masyarakat patriarkhal meyakinkan dirinya sendiri bahwa konstruksi budaya adalah “alamiah” dan karena itu “normalitas” seseorang tergantung pada kemampuannya untuk menunjukkan identitas dan perilaku gender. Perilaku ini secara kultural dihubungkan dengan jenis kelamin biologis seseorang. Masyarakat patriarkhal menggunakan peran gender yang kaku untuk memastikan perempuan tetap pasif (penuh kasih sayang, penurut, tanggap terhadap simpati dan persetujuan, ceria,

baik, ramah) dan laki-laki tetap aktif (kuat, agresif, penuh rasa ingin tahu, ambisius, penuh rencana, bertanggung jawab, orisinal, kompetitif) (Tong, 2008:72-73). Adapun menurut Millet (Sofia, 2009:10), ideologi dalam patriarkal dalam akademi, institusi keagamaan, dan keluarga membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang berakibat bagi kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi diri terhadap laki-laki.

Dalam kenyataannya proses menjadi perempuan disebabkan oleh nilai-nilai kultural dan bukan oleh hakikatnya. Oleh karena itu, gerakan dan teori feminisme berjuang agar nilai-nilai kultural yang menempatkan perempuan sebagai Liyan, sebagai kelompok `yang lain`, yang termarginalkan dapat digantikan dengan keseimbangan yang dinamis antara perempuan dan laki-laki. Pembicaraan perempuan dari segi teori feminis akan melibatkan masalah gender, yaitu bagaimana perempuan tersubordinasi secara kultural. Analisis feminis pasti akan mempermasalahkan perempuan dalam hubungannya untuk menuntut persamaan hak, dengan kata lain tuntutan emansipasi.

Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminisme mengungkap nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminisme menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta bagaimana feminisme membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan tersebut.

Feminisme bukanlah upaya pembontakan terhadap laki-laki, upaya melawan pranata sosial seperti institusi rumah tangga dan perkawinan, ataupun upaya perempuan untuk mengingkari kodratnya, melainkan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi perempuan. Dalam hal ini, sasaran feminisme bukan sekadar masalah gender, melainkan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Gerakan feminisme merupakan gerakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur sosial yang tidak adil menuju keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan (Fakih, 2007:78-79). Oleh karena itu, feminisme menghendaki kemandirian perempuan, tidak hanya tergantung kepada kaum laki-laki.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan serta usaha untuk mengubah usaha tersebut menuju suatu sistem masyarakat yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan harkat dan kebebasan perempuan dalam mengelola kehidupan dan tumbuhnya baik di ruang domestik dalam rumah tangga maupun di ruang publik dalam lingkungan masyarakat. Kaum feminis juga menuntut suatu masyarakat yang adil serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, untuk bisa menjadi feminis tidak harus menjadi berjenis kelamin perempuan. Laki-laki pun bisa menjadi feminis asal mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

2.1.2 Sejarah Feminisme

Gerakan feminisme secara umum merupakan suatu reaksi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang patriarkhi (Mustaqim, 2008:88). Secara historis, gerakan feminisme di Barat terkait dengan lahirnya *renaissance* di Italia yang membawa fajar kebangkitan kesadaran baru Eropa. Pada saat itu muncullah para humanis yang menghargai manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu yang bebas menggunakan akal budinya, bebas dari pemasungan intelektual geraja.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1792, berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan dari kalangan atas sampai kalangan bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, hak atas milik, dan hak pekerjaan. Ketika tidak memiliki hak-hak tersebut, kedudukan perempuan tidaklah sama di hadapan hukum. Menurut mereka, ketertinggalan tersebut disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian.

Karena gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial yang menghendaki perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Pada tahun 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda. Kemudian tahun 1837, kata feminisme

dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier. Pada tahun yang sama, Grimke membuat sebuah tulisan yang terkait dengan feminisme. Dalam tulisannya tersebut ia mengatakan sebagai berikut.

Kami tidak meminta untuk diistimewakan atau berusaha merebut kekuasaan tertentu. Yang sebenarnya kami inginkan adalah sederhana, bahwa, mereka mengangkat kaki mereka dari tubuh kami dan membiarkan kami berdiri tegap sama seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan (Sarah Grimke, 1837)

Pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah. Adapun kaum perempuan ditempatkan di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis pada abad XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Adapun fundamentalisme agama yang melakukan operasi kaum perempuan memperburuk situasi. Dilingkungan agama Kristen terjadi praktik-praktik dan khotbah-khotbah yang menunjang hal tersebut ditilik dari banyaknya gereja yang menolak adanya pendeta perempuan dan beberapa jabatan “tua” yang hanya dijabat oleh laki-laki.

Gerakan feminisme berkembang pusat di Amerika setelah munculnya publikasi John Stuart Mill (1869) yang berjudul *The Subjection of Women* (Broto dalam Darma, 2009:145). Gerakan ini menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Menjelang abad IX, feminisme lahir, menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan-perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai keterikatan universal (*universal sisterhood*). Gerakan ini memunculkan lahirnya feminisme gelombang kedua. Pada tahun 1960 bersamaan dengan munculnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan Eropa, menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih. Pada saat itu untuk pertama kali, perempuan diberi hak suara di parlemen, hak pilih, dan diikutsertakan dalam ranah politik kenegaraan. Perjuangan gerakan feminisme berkembang lebih luas dengan tuntutan untuk mencapai kesederajatan dan kesetaraan harkat serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya baik di ruang domestik maupun di ruang publik (Darma, 2009:145). Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helena Cixous dan Julia Kristeva.

Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Pada saat itu benih-benih feminisme mulai muncul, meski dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminisme yang dapat menulis secara teoretis tentang persoalan. Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya

pertama berjudul *The Second Sex*. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu pergerakan perempuan barat mengalami kemajuan yang pesat. Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka (bafagih dalam <http://www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html>).

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The FeminismeMystique* yang ditulis oleh Betty Friedan membentuk organisasi perempuan bernama *National Organization for Woman* (NOW) pada tahun 1966 yang gemanya merambah ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundang-undangan, tulisan Betty berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right* (1963) dan *Equal Right Act* (1964). *Equal Pay Right* merupakan peraturan tentang pembayaran kerja sehingga kaum perempuan dapat menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Adapun *Equal Right Act* merupakan peraturan tentang hak pilih yang menghendaki perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang.

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada tahun 1960-an menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarki yang kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.

Gerakan feminisme tersebut telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Akan tetapi bukan berarti perjuangan perempuan berhenti sampai di situ, Wacana-wacana baru terus bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah perjuangan tersulit dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam kamar-kamar pribadi. Karena perjuangan kesetaraan perempuan tetap akan bergulir sampai perempuan berdiri tegap seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan.

Gerakan feminisme di Indonesia dimulai sejak masa prakemerdekaan. Gerakan feminisme di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata dari kalangan atas, seperti Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien, dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih mengarah pada pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan pada masa itu. Sementara itu, Cut Nya' Dien yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarki Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan masa kini di Indonesia.

Pada masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan feminisme terbilang cukup dinamis dan memiliki *bargaining* cukup tinggi. Akan tetapi, kondisi semacam ini mulai “tumbang” sejak Orde Baru (Orba) berkuasa. Bahkan, mungkin perlu dipertanyakan apakah gerakan perempuan di masa rejim Orde Baru. Bila menggunakan definisi tradisional yang menghendaki gerakan feminisme diharuskan berbasis massa, sulit dikatakan ada gerakan feminisme ketika itu. Apalagi bila definisi tradisional ini dikaitkan dengan batasan ala Alvarez yang memandang gerakan feminisme sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggota sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Alvarez tidak mengikutkan organisasi perempuan milik pemerintah atau organisasi perempuan milik parpol serta organisasi perempuan di bawah payung organisasi lain dalam definisinya tersebut.

2.1.3 Aliran-Aliran Feminisme

Gerakan perempuan tidak pernah mengalami keseragaman di muka bumi ini. Antara satu negara dan satu budaya dengan negara dan budaya lain memiliki pola yang kadang berbeda, bahkan ambivalen. Feminisme sebagai sebuah isme dalam perjuangan pergerakan perempuan juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat.

Ide atau gagasan para feminis yang berbeda di tiap negara ini misalnya tampak pada para feminis Italia yang justru memutuskan diri untuk menjadi oposan dari pendefinisian dari kata feminisme yang berkembang di Barat pada umumnya. Mereka tidak terlalu setuju dengan konsep yang mengatakan bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan di ranah publik, akan berdampak pada timbulnya

kesetaraan. Para feminis Itali lebih banyak mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Mereka memiliki UDI (*Union Donne Italiano*) yang setara dan sebesar NOW (*National Organisation for Women*) di Amerika Serikat. Pola penekanan perjuangan feminis Itali ini meningkatkan kita pada gaya perjuangan perempuan di banom-banom NU di Indonesia.

Masalah feminisme sedikit berbeda di Perancis. Umumnya feminis menolak di juluki sebagai feminis. Para perempuan yang tergabung dalam *movement de liberation des femmes* ini lebih berbasis kepada psikoanalisis dan kritik sosial. Di Inggris pun seperti tokoh-tokoh Juliet Mitchell dan Ann Oakley termasuk menentang klaim-klaim biologis yang dilontarkan para feminis radikal dan liberal yang menjadi tren di tahun 60-an. Bagi mereka, yang bias menjadi pemersatu kaum perempuan adalah konstruksi sosial bukan semata kodrat biologinya.

Di dunia Arab, istilah feminisme dan feminis tertolak lebih karena faktor image barat yang melekat pada istilah tersebut. Pejuang feminis di sana menyiasati masalah ini dengan menggunakan istilah yang lebih Arab atau Islam seperti *Nisa`i* dan *Nisaism*.

Meskipun di kemudian hari definisi feminisme banyak mengalami pergeseran. Namun, rata-rata feminis tetap melihat bahwa setiap konsep, entah itu dari kubu liberal, radikal maupun, sosialis tetap beraliansi secara subordinat terhadap ideologi politik tertentu. Dan konflik yang terjadi di antara feminis itu sendiri disebabkan diksi politik konvensional melawan yang moderat. Misalnya konsep

otonomi dari kubu feminis liberal menekankan pada pentingnya memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dalam kerangka bermasyarakat dan berpolitik yang plural. Inilah mengapa feminis selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa.

2.1.3.1 Aliran Feminisme Berdasarkan Politik yang Berkembang

1. Femenisme Radikal

Struktur dasar feminisme radikal adalah bahwa tidak ada perbedaan antara tujuan personal dengan politik. Artinya unsur-unsur biologi dan seks sebagai rangkaian kegiatan manusia yang alamiah yang sebenarnya bentuk dari *sexual politics*. Ketidakadilan gender yang tidak dialami oleh kaum perempuan disebabkan oleh masalah yang berakar pada kaum laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Keadaan biologis kaum laki-laki yang membuat mereka lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kaum perempuan. Gerakan mengadopsi sifat-sifat maskulin dianggap sebagai kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum laki-laki (Fakih, 2007:83:86). Menurut feminisme radikal, kekuatan laki-laki memaksa melalui lembaga personal, seperti fungsi produksi, pekerjaan rumah tangga, perkawinan, dan sebagainya. Kekuasaan laki-laki terhadap perempuan tidak pernah disadari dan hal itu dianggap sebagai bentuk dasar penindasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik, masalah yang dianggap

paling tahu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena keberaniannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang RI No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Gerakan feminisme radikal dapat diartikan sebagai gerakan perempuan yang bertujuan dalam realitas sosial. Oleh karena itu, feminisme radikal mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang mengakar kuat dan melembaga dalam masyarakat. Adapun strategi feminisme radikal dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut adalah pembebasan perempuan yang dapat dicapai melalui organisasi perempuan yang memiliki otonomi, serta melalui *cultural feminism* (Mustaqim, 2008:100).

2. Feminisme Liberal

Feminisme liberal berawal dari teori politik liberal yang menghendaki manusia secara individu dijunjung tinggi, termasuk di dalamnya nilai otonomi, nilai persamaan, dan nilai moral yang tidak boleh dipaksa, tidak diindoktrinasikan dan bebas memiliki penilaian sendiri. Feminisme liberal sebagai turunan dari teori politik liberal. Pada mulanya Feminisme liberal menentang diskriminasi perempuan dalam perundang-undangan. Mereka menuntut adanya persamaan dalam hak pilih, perceraian, dan kepemilikan harta benda. Feminis liberal menekankan kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalisme. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar

perjuangan feminisme adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. (Muslikhati, 2004:32).

3. Feminisme Marxis

Menurut perspektif feminisme marxis, sebelum kapitalis berkembang, adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Akan tetapi, setelah berkembang kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam kegiatan produksi.

Akibat dari hal itu adalah terjadi pembagian kerja secara seksual, yaitu laki-laki bekerja di sektor publik yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Karena kepemilikan materi menentukan nilai eksistensi seseorang, sebagai konsekuensinya perempuan yang berada di sektor domestik dan tidak produktif dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Dengan demikian, salah satu cara untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan keluarga adalah perempuan harus masuk ke sektor publik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi sehingga konsep pekerjaan domestik perempuan tidak lagi ada.

4. Feminisme Sosialis

Feminisme Sosialis merupakan sintesis dari feminisme radikal dan feminisme marxis. Asumsi dasar yang dipakai adalah bahwa hidup di dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama bagi keterbelakangan perempuan, Feminisme sosialis memandang bahwa perempuan mengalami penurunan (*reducing process*) dalam hubungan masyarakatnya, dan bukan perubahan radikal atau perjuangan kelas (Mustaqim, 2008:102).

Gerakan feminisme sosialis lebih difokuskan pada penyadaran kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Karena banyak perempuan yang tidak menyadari ketertindasan tersebut, perlu adanya partisipasi laki-laki untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kesetaraan. Tujuan feminisme sosialis adalah membentuk hubungan sosialis menjadi lebih manusiawi.

5. Feminisme Ras atau Feminisme Etnis

Feminisme ras lebih mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna.

6. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan feminisme postkolonial berakar dari penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekaskoloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar

bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi focus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.

Dari semua aliran yang telah disebutkan, masih berpotensi untuk berkembang menjadi beberapa sempalan aliran lain, misalnya feminisme aliran muslim (Mustaqim, 2008:161). Seperti yang telah diungkapkan di atas, wacana feminisme dan gerakan perempuan akan terus berkembang seiring dengan ragam perkembangan kelas masyarakat yang memperjuangkannya, kecenderungan kondisi sosial politik, serta kepentingan yang membingkai perjuangan tersebut. Berikut ini merupakan ketiga kategori kecenderungan besar yang dapat disebutkan dan cukup dikenal dan berpengaruh dalam kajian feminisme, yakni :feminisme ortodoks, posfeminisme poskolonial, dan feminisme muslim.

2.1.3.2 Aliran Feminisme Berdasarkan Ragam Perkembangan Kelas Masyarakat yang Memperjuangkannya, Kecenderungan Kondisi Sosial Politik, serta Kepentingan yang Membingkai Perjuangannya

1. Feminisme Ortodoks

Feminisme Ortodoks dikenal sebagai feminisme gelombang kedua. Ciri dari feminisme ini adalah berkarakter sangat fanatik dan ortodoks dengan penjelasan-penjelasan wacana patriarki. Kaum feminis garis keras ini begitu yakin bahwa segala sesuatu yang menyusahakan dan menindas perempuan berhubungan dengan patriarki. Camille Paclia seorang professor studi kemanusiaan dari Universitas Philadelphia mengkritik sifat feminis ortodoks sebagai kelompok yang selalu menganggap perempuan sebagai korban.

Bagi kalangan feminis ortodoks, feminisme diartikan sebagai identifikasi dengan keinginan kesetaraan gender lewat perjuangan historis yang dicapai dengan advokasi melalui kegiatan politik. Feminisme memperlihatkan adanya perbedaan antara feminisme dan maskulin yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Adapun jantan (*male*) dan betina (*female*) merupakan aspek biologis yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan linguistik ini bagi feminis ortodoks dianggap sebagai sesuatu yang ideologis, sedangkan bagi kalangan postfeminisme dianggap sebagai masalah.

2. Feminisme Postfeminisme

Kecenderungan feminisme ortodoks yang selalu melihat perempuan sebagai makhluk lemah dan tak berdaya sebagai korban laki-laki, tidak dapat diterima oleh perempuan-perempuan muda tahun 1900-an dan 2000 di beberapa negara maju. Retorika feminisme yang melekat pada “ibu-ibu” mereka terutama di tahun 70-an di daratan Amerika dan Inggris telah membuat generasi kedua “bosan” dengan feminisme. Feminisme seakan menjadi ukuran moralistik dan politik seseorang dan menjadi pergerakan kaum histeris, serta sangat mudah menuduh dan melabelkan seseorang dengan atribut “tidak feminis”. Kelompok inilah yang kemudian memperjuangkan postfeminisme.

Embrio kelompok ini sudah muncul di tahun 1968 di Paris tepatnya ketika mereka (kelompok anggota *po et psych /politique psychoanalyse*) turun ke jalan pada hari perempuan tanggal 8 Maret 1968 dan meneriakkan “*Down with feminism*”.

Sejak tahun 1968 kelompok postfeminis ini telah berusaha mendekonstruksi wacana patriarkal terutama wacana yang dikembangkan oleh *feminists revolutionaries* (FR). Bagi kelompok *po et psych*, posisi FR yang memakai semangat humanism, jatuh lagi pada esensialisme yang mempunyai kategori *fixed*. Oleh karena itu, *po et psych* mengadopsiteori psikonalisis Freud yang mencoba menggunakan metode dekonstruksi dalam melihat teks-teks ketertindasan perempuan. Selain itu, kelompok ini tidak menekankan pada kesetaraan (*equality*) seperti kelompok FR, yaitu identitas dan gender, tetapi lebih menekankan pada perbedaan (*difference*). Di sini dapat dipahami bila postfeminisme membawa paradigm baru dalam feminisme, dan perdebatan seputar kesetaraan ke perdebatan seputar perbedaan.

3. Feminisme Islam/Muslim

Yang tergolong tokoh-tokoh feminisme Islam adalah Riffat Hasan, Kamla Bashin, Ninghat Said Khan (Mustaqim, 2008:161). Feminisme dalam konteks Islam yang digagas Riffat adalah untuk pembebasan (*liberation; taharrur*) bagi perempuan dan laki-laki dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil, dengan cara merujuk kitab suci (baca: Al-Quran) yang diyakini sebagai sumber nilai tertinggi (Mustaqim, 2008:174-175). Aliran feminisme ini berkeyakinan bahwa karena Allah Mahaadil, tentu Islam membawa misi keadilan, keadilan terhadap siapapun, baik diantara sesama manusia yang berbeda agama maupun jenis kelamin.

Menurut aliran ini, Al-Quran hadir dengan mengedepankan wacana keadilan dan kesetaraan gender. Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berdasarkan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan (Fakih, 2007:52). Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam menganut paham keadilan, segenap ketidakadilan yang berkembang pada masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran yang sering kali muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial (*asbabunnuzul*) dari suatu ayat pada saat ini. Adapun Hafidz dalam Mustaqim (2008:185) mengatakan bahwa inti dari gerakan feminisme adalah memperjuangkan keadilan gender sebagai salah satu bagian keadilan sosial. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76 yang artinya sebagai berikut.

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*) yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Prinsip al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, hak istri diakui secara adil dengan hak suami. Laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, sebaliknya kaum perempuan juga memiliki hak kewajiban terhadap kaum laki-laki. Dalam hal ini, al-Quran dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberi keadilan hak antara laki-laki dan perempuan

(Fakih, 2007:50).Kedudukan suami dan istri adalah sejajar dalam al-Quran. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.Perempuan adalah patner kaum laki-laki tnpa memandang ras, etnik, agama, atau bangsa (Sadli, 2010:340).Inti dari pernyataan tersebut adalah semua manusia harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan seseorang dengan menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi.Universalitas hak asasi manusia bermakna bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan karenanya bersifat kodrati. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dasar yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak pendidikan, dan hak budaya yang sama.

Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah untuk membaca atau belajar.Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, mereka dituntut untuk belajar (Syihab, 2004:38). Adapun banyaknya ketertinggalan perempuan muslim dalam bidang pendidikan disebabkan oleh ketiadaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kaum perempuan seperti yang diberikan kepadakaum laki-laki. Ketertinggalan kaum perempuan bukan karena fitrahnya selaku makhluk yang tidak cerdas dan emosional, melainkan diakibatkan oleh keterbelakangan kaum perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, gerakan feminisme Islam memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristik feminisme Islam antara lain sebagai berikut.

- a) Feminisme Islam mendasarkan diri pada agama. Artinya bahwa feminisme Islam harus menyadari bahwa agama Islam (Al-Quran dan Hadits) merupakan sumber nilai dan pendukung terbaik dalam perjuangannya dan yang menjamin akan hak-hak perempuan.
- b) Feminisme Islam harus merujuk pada prinsip-prinsip ajaran Al-Quran sebagai sumber nilai tertinggi dan perilaku Rasulullah SAW sebagai *uswatun hasanah*.
- c) Feminisme Islam tidak bersikap *chauvinistik*. Artinya kaum feminis Islam tidak menekankan kekuatannya pada perempuan dengan mengabaikan potensi kekuatan laki-laki ataupun meruntuhkannya. Karena perempuan dan laki-laki sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai mitra, mereka dapat saling melengkapi satu sama lain serta hidup secara harmonis menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
- d) Feminisme Islam memandang ajaran Islam secara integral dan menyeluruh. Artinya Al-Quran dan tradisi-tradisi Islam yang pernah muncul dalam sejarah dapat dijadikan pisau analisis dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dengan mempertimbangkan konteks sosiokultural pada waktu itu dan konteks kekinian untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Islam (Mustaqim, 2008:108-109).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya feminisme bukan merupakan pemberontakan kaum perempuan kepada laki-laki, upaya melawan pranata sosial, seperti institusi rumah tangga dan perkawinan atau upaya perempuan untuk mengingkari kodratnya, melainkan lebih sebagai upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi perempuan (Fakih, 2007:5). Feminisme muncul sebagai akibat dari adanya prasangka gender yang memordukan perempuan. Anggapan bahwa secara universal laki-laki berbeda dengan perempuan mengakibatkan perempuan dinomorduakan. Perbedaan tersebut tidak hanya pada kriteria biologis, melainkan juga pada kriteria sosial. Asumsi tersebut membuat kaum perempuan semakin terpojok. Oleh karena itu, kaum feminis memperjuangkan hak-hak perempuan pada semua aspek kehidupan dengan tujuan agar kaum perempuan pada semua aspek kehidupan mendapatkan kedudukan yang sederajat yang setidaknya sejajar dengan kaum laki-laki.

Perkembangan aliran feminisme di Indonesia dapat dikatakan masih mengalami euphoria feminisme. Di Indonesia lebih berkembang politik gender sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena politik gender telah diakui oleh dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun feminisme berkembang secara sendiri-sendiri di setiap negara sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara tersebut.

2.2 Feminisme dalam Sastra

Sumbangan terpenting poststrukturalisme terhadap kebudayaan adalah pergeseran paradigma dari pusat ke pinggiran. Studi kultural kemudian diarahkan pada kompetensi masyarakat tertentu, masyarakat yang terlupakan, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat marginal. Teori sastra feminis yaitu teori yang berhubungan dengan gerakan perempuan adalah salah satu aliran yang banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan studi kultural. Sastra feminis berakar feminisme, selain merupakan gerakan kebudayaan, politik, sosial, dan ekonomi, juga merupakan salah satu teori sastra. Teori sastra feminis melihat bagaimana nilai-nilai budaya yang dianut suatu masyarakat, suatu kebudayaan, yang menempatkan perempuan pada kedudukan tertentu serta melihat bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkatan psikologis dan budaya. Dalam hubungannya dengan studi sastra, Hill dalam Darma (2009:157) berpendapat bahwa karya sastra merupakan struktur yang kompleks. Oleh karena itu, untuk memaknai karya sastra haruslah karya sastra itu yang dianalisis.

Karya sastra akan dilihat sebagai teks yang merupakan objek dan data yang selalu terbuka bagi pembacaan dan penafsiran yang beragam. Teks diterima dan dipahami oleh pembacanya dan lingkungan budaya tempat teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi (Cavallaro, 2001:110-111). Terkait dengan karya sastra dan gerakan feminis, Register dalam Darma (2009:161) menilai karya sastra sebagai sesuatu yang berguna bagi pengarahannya kebesaran perempuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Faruk dalam Darma (2009:161) mengemukakan bahwa hubungan sastra dengan

struktur gender menjelaskan masalah bahasa terlebih dahulu, bahasa merupakan proses terus-menerus melakukan tindakan gender.

Sejak awal, sastra modern menempatkan diri sebagai suatu aktivitas dan hasil aktivitas yang dimaksudkan untuk menerobos segala kemungkinan yang ditutupi oleh bahasa. Perempuan dalam karya sastra ditampilkan dalam kerangka hubungan ekuivalensi dengan seperangkat tata nilai marginal dan yang tersubordinasi lainnya, yaitu sentimental, perasaan, dan spiritual. Perempuan hampir selalu menjadi tokoh yang dibela, korban yang selalu diimbau untuk mendapat perhatian (Faruk dalam Darma, 2009:161-162). Karya sastra hanya menempatkan perempuan sebagai korban, makhluk yang hanya mempunyai perasaan dan kepekaan spiritual.

Feminisme sebagai suatu ideologi berusaha untuk membela kaum perempuan dari diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan represi yang dilakukan oleh masyarakat dan negara yang masih menganut ideologi patriarki. Kaum feminis menuntut demokratisasi dan kebebasan untuk berkiprah di ruang publik untuk mencapai kesederajatan dan kesetaraan harkat serta kebebasan perempuan untuk memilih dan mengelola kehidupan serta tubuhnya baik di ruang domestik maupun di ruang publik.

2.3 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal

28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Contoh hak asasi manusia (HAM) antara lain hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, dan lain-lain.

2.3.1 Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*)

Hak pribadi terdiri atas hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat; hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan; dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2.3.2 Hak Asasi Politik (*Political Right*)

Hak asasi politik terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya; dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

2.3.3 Hak Asasi Hukum (*Legal Aquality Right*)

Hak asasi hukum terdiri atas hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS; dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

2.3.4 Hak Asasi Ekonomi (*Property Right*)

Hak asasi ekonomi terdiri atas hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; hak kebebasan menyelenggarakan untuk sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain; hak kebebasan untuk memiliki sesuatu; dan hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

2.3.5 Hak Asasi Peradilan (*Procedural Right*)

Hak asasi peradilan terdiri atas hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan serta penyelidikan di mata hukum.

2.3.6 Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Right*)

Hak asasi sosial budaya terdiri atas hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan; hak mendapatkan pengajaran; dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

2.4 Hak Perempuan dalam Islam

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dan sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam beberapa hal ada yang harus berbedakarena laki-laki dan perempuan hakikatnya adalah makhluk yang berbeda.

2.4.1 Hak-Hak Perempuan pada Masa Kanak-Kanak

Pada masa jahiliyah tersebar di kalangan bangsa Arab khususnya, kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena keengganan mereka memelihara anak perempuan. Lalu datanglah Islam mengharamkan perbuatan tersebut dan menuntun

manusia untuk berbuat baik kepada anak perempuan serta menjaganya dengan baik. Ganjaran yang besar pun dijanjikan bagi yang mau melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran dalam hadits yang artinya sebagai berikut

“Siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga keduanya mencapai usia baligh maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti dua jari ini.” Beliau menggabungkan jari-jemarinya. (HR. Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu’anh).

2.4.2 Hak-Hak Perempuan sebagai Seorang Ibu

Islam memuliakan perempuan dari mulai masa kanak-kanak, masa remaja, dan saat ia menjadi seorang ibu. Allah SWT mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibu. Allah SWT memerintahkan hal tersebut setelah mewajibkan ibadah hanya kepada-Nya.

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Abu Hurairah r.a., seorang sahabat Rasul yang sangat berbakti kepada ibunya berkata bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai berikut.

“Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk berbuat baik kepadanya?” Rasulullah menjawab, “Ibumu” “Kemudian siapa?” Tanya lagi, “ibumu,” “kemudian siapa?” Tanya orang itu lagi. “kemudian ayahmu,” jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari no. 5971 dan muslimNo.6447)

Hadis tersebut menunjukkan pada kita bahwa hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah dalam menerima perbuatan dari anaknya. Hal itu disebabkan seorang ibu yang merasakan kepayahan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ibu yang bersendirian merasakan dan menanggung ketiga hal tersebut. Adapun dalam hal mendidik barulah seorang ayah ikut andil di dalamnya. Demikian dinyatakan Ibnu

Baththal rahimahullahu sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullahu. (Fathul Bari, 10/493).

2.4.3 Hak Perempuan sebagai Istri

Allah SWT memerintahkan seorang suami agar bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik.

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik.” (An-Nisa :19)

Asy-Syaikh “ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di menyatakan bahwa ayat tersebut di atas meliputi pergaulan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma’ruf, menemani, dan menyertai (hari-hari bersamanya) dengan baik, menahan gangguan terhadapnya (tidak menyakitinya), mencurahkan kebaikan dan memperbagus hubungan dengannya. Termasuk dalam hal ini pemberian nafkah, pakaian, dan semisalnya. Tentunya pemenuhannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan (Taisir Al-Karimirir Rahman, hal. 172). Ayat tersebut juga diperkuat dengan hadits Nabi kepada para suami sebagai berikut.

Rasulullah SAW bersabda kepada kepada para suami: “Jangalah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Beliau juga bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. Ahmad 2/527, At-Tirmidzi no. 1172. Dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu dalam Ash-Shahihul Musnad,2/336-337)

2.4.4 Hak Perempuan untuk Memperoleh Nafkah

Perempuan ditanggung nafkahnya oleh walinya bagi yang belum menikah. Perempuan yang yatim piatu, tanpa kerabat yang mau menafkahi, nafkahnya di tanggung negara. Janda yang dicerai suaminya, berhak mendapatkan santunan selama masa

iddah. Setelah itu ia kembali dinafkahi walinya apabila wali dan kerabatnya masih mampu. Jika tidak, negara yang mengambil alih memberikan santunan berupa pemenuhan kebutuhan pokoknya. Intinya, perempuan tidak dibebani untuk memikirkan kebutuhan ekonominya sendiri sehingga tidak mengganggu fungsi dan tugas perempuan di ranah publik, sebagai manajer rumah tangga dan pendidik anak.

2.4.5 Hak Perempuan untuk Memperoleh Pendidikan

Perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan dari kedua orangtuanya, terutama ibu. Di publik, ia berhak menuntut ilmu di lembaga pendidikan dengan gratis atau biaya terjangkau karena pendidikan dijamin oleh negara. Itu karena Islam mewajibkan perempuan sama seperti laki-laki dalam menuntut ilmu.

2.4.6 Hak Perempuan untuk Dapat Mengaktualisasikan Diri

Perempuan dalam Islam boleh-boleh saja berkiprah di ranah publik, selama tidak membahayakan eksistensinya. Tidak mengeksploitasi tubuh dan kepentingan apapun, tidak menjerumuskan diri dalam perbuatan yang merusak kehormatannya, tidak melanggar susila dan yang penting membawa maslahat bagi masyarakat. Negara pun wajib melindungi perempuan yang berkiprah di ranah publik ini dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Misalnya menjadikan pakaian takwa (jilbab) sebagai benteng agar tidak diganggu, memberi sanksi berat bagi pelaku pelecehan terhadap perempuan, dan lain-lain. Dengan begitu perempuan bebas dan merasa aman berkiprah di lingkungan domestik maupun publik. Jilbab dinilai pengekang oleh kalangan sekuler, justru merupakan bentuk kebebasan bagi muslimah. Dengan jilbab

perempuan tidak perlu repot memikirkan setiap penampilan dirinya. Apalagi harus mengikuti tren yang berubah terus-menerus.

2.4.7 Hak Perempuan untuk Hak Beragama

Perempuan dalam Islam berhak menjalankan syariat Islam secara *kaffah* tanpa kekangan. Berjilbab dan berkerudung tidak boleh dilarang. Perempuan berhak mengkaji Islam, mendalami fikih, tafsir, dan lain-lain sesuai kehendak dirinya. Perempuan berhak menjalankan syariat agamanya tanpa hambatan dari siapapun. Perempuan tidak boleh murtad sebagaimana muslim umumnya. Negara wajib menjaga keimanan kaum perempuan agar tetap dalam suasana kondusif sehingga tidak terjerumus dalam kekufuran. Perempuan harus mempermudah dalam menjalankan aturan Islam seutuhnya. Dengan begitu perempuan makin dekat hubungannya dengan Allah SWT.

2.4.8 Hak Perempuan untuk Masalah Seksual

Perempuan dijamin hak seksualnya melalui lembaga pernikahan bagi yang sudah mampu. Lembaga ini menjadi benteng untuk menjaga kesucian kaum perempuan, mencegah pelecehan seksual dan mencegah perdagangan perempuan. Islam mengharamkan perempuan memenuhi hak seksualnya dengan perzinahan, nikah mut'ah, kawin kontrak, jadi selir, gindik atau selingkuhan. Islam juga mengharamkan kalau perempuan tidak dihormati atau tidak dijaga harga dirinya.

Berdasarkan pandangan tersebut, penjagaan Islam terhadap hak perempuan dan pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan sangatlah tinggi. Persoalannya adalah bagaimana menyosialisasikan dan mengimplementasikan hal tersebut kepada laki-laki yang masih melakukan banyak ketidakadilan terhadap perempuan karena pemahaman terhadap ayat-ayat Allah SWT dan hadits-hadits Nabi SAW secara setengah-setengah. Untuk itulah sebenarnya feminis Islam dapat berperan memberikan penyadaran terhadap kaum perempuan dan juga laki-laki.

2.5 Kondisi Perempuan Indonesia Saat ini

Kondisi perempuan Indonesia saat ini jauh lebih baik daripada masa sebelumnya. Kesempatan kerja dan berkarier, kesempatan pendidikan, kesempatan dalam lembaga-lembaga publik dan politik yang dimiliki perempuan hampir sama besar dengan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki (Irawati, *Kompas*, 23 April 2010). Berbagai kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan keadilan gender juga mulai berkembang. Misalnya Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutaman Gender, UU No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan sebagainya. Lembaga-lembaga khusus yang memiliki program pemberdayaan dan penguatan hak-hak perempuan, baik lembaga negara maupun nonnegara, tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komisi khusus antikekerasan terhadap perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Feminisasi kemiskinan yang semakin kuat akibat globalisasi ekonomi melalui *free trade* (perdagangan bebas) juga masih perlu advokasi khusus.

2.6 Pengertian, Jenis, dan Cara Kerja Kritik Sastra Feminis

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian kritik sastra feminis dan jenis-jenis kritik sastra feminis yang terdiri atas KSF ideologis, KSF Ginokritis, KSF marxis/sosialis, KSF psikoanalitik, KSF lesbian, dan KSF ras/etnik; serta cara kerja kritik sastra feminis.

2.6.1 Pengertian Kritik Sastra Feminis

Dari berbagai pemikiran feminisme terlihat bahwa munculnya ide-ide feminisme berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada mendorong citra perempuan masih belum memenuhi cita-cita persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kesadaran akan ketimpangan struktur, sistem, dan tradisi masyarakat di berbagai bidang inilah yang kemudian melahirkan kritik feminis.

Kritik sastra feminis merupakan salah satu disiplin ilmu kritik sastra yang lahir sebagai respon atas berkembang luasnya feminisme di berbagai penjuru dunia. Djajnegara (2003:27) mengatakan bahwa kritik sastra feminis berasal dari hasrat para feminis untuk mengkaji karya penulis-penulis di masa silam dan untuk mewujudkan citra wanita dalam karya penulis-penulis pria yang menampilkan wanita sebagai makhluk yang dengan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan serta disepelekan oleh tradisi patriarkat yang dominan.

Newton dalam Sofia (2009:63) mengatakan bahwa kritik sastra feminis mencerminkan tujuan politik dari feminisme berdasarkan ideologi feminis. Kritik sastra feminis terhadap sastra digunakan sebagai materi pergerakan kebebasan perempuan dan dalam menyosialisasikan ide feminis. Kritik feminis terhadap karya sastra mengadopsi sudut pandang ini mengenai bagaimana karakter perempuan digambarkan dalam sastra. Terkait dengan hal tersebut, Culler dalam Sofia (2009:20) berpendapat bahwa kritik sastra feminis mempermasalahkan asumsi tentang perempuan yang berdasarkan paham tertentu selalu dikaitkan dengan kodrat perempuan yang kemudian menimbulkan isu tertentu tentang perempuan. Selain itu, kritik ini berusaha mengidentifikasi suatu pengalaman dan perspektif pemikiran laki-laki melalui cerita yang dikemas sebagai pengalaman manusia dan karya sastra. Hal ini dimaksudkan untuk mengubah pemahaman terhadap karya sastra sekaligus terhadap signifikansi berbagai kode gender yang ditampilkan teks berdasarkan hipotesis yang disusun.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Culler dalam Sofia (2009:20), menawarkan konsep *reading as a woman* (membaca sebagai perempuan) sebagai bentuk kritik sastra feminis. Konsep ini dilakukan melalui sebuah pendekatan yang berusaha membuat pembaca menjadi kritis hingga menghasilkan penilaian terhadap makna teks, yaitu dengan menganalisis ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarkal yang diasumsikan terdapat dalam penulisan dan pembacaan sastra. Selanjutnya, dengan membaca sebagai perempuan seorang penganalisis menghadapi suatu karya dengan berpijak

pada kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang berbeda yang memengaruhi dan banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan.

Sejalan dengan tujuan feminisme, yaitu untuk mengakhiri dominasi laki-laki, kritik sastra feminis mengambil peran sebagai suatu bentuk kritik negosiasi, bukan sebagai bentuk konfrontasi. Kritik ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbangkan wacana-wacana dominan, bukan untuk berkompromi dengan wacana dominan tersebut. Kritik sastra feminis lebih dari sekadar perspektif. Ia menampilkan kecanggihan dengan menggunakan aliansi strategi dengan teori-teori kritis (Ruthven, 1990:6-7). Terkait dengan hal tersebut, Ruthven (1990:37) mengatakan bahwa kritik sastra feminis merupakan kritik sastra yang berusaha menjelaskan cara penggambaran perempuan dan menjelaskan potensi-potensi yang dimiliki perempuan ditengah kekuasaan patriarki. Kritik sastra feminis diharapkan mampu membuka pandangan-pandangan baru, terutama yang berkaitan dengan cara-cara mewakilkan karakter-karakter perempuan dalam karya sastra.

2.6.2 Jenis-jenis Kritik Sastra Feminis

Ada beberapa jenis kritik sastra feminis yang berkembang dalam masyarakat. Jenis kritik sastra feminis yang berkembang dalam masyarakat antara lain sebagai berikut.

2.6.2.1 Kritik Ideologi

Kritik sastra feminis ideologi ini melibatkan perempuan, khususnya kaum-kaum feminis sebagai pembaca. Yang menjadi pusat perhatian pembaca adalah citra serta stereotipe seorang perempuan dalam karya sastra. Kritik ini juga meneliti

kesalahpahaman tentang perempuan dan sebab-sebab mengapa perempuan sering diperhitungkan, bahkan nyaris diabaikan.

2.6.2.2 Ginokritis

Dalam raga mini termasuk penelitian tentang sejarah karya sastra perempuan, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur penulisan perempuan dan mencari perbedaan yang mendasar dengan penulis laki-laki. Di samping itu, dikaji juga kreativitas penulis perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan.

2.6.2.3 Kritik Sastra Feminis Marxis/Sosialis

Kritik ini meneliti tokoh-tokoh perempuan dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Pengeritik feminis mencoba mengungkapkan bahwa kaum perempuan merupakan kelas masyarakat yang tertindas.

2.6.2.4 Kritik Sastra Feminis Psikoanalitik

Kritik sastra feminis psikoanalitik merupakan tulisan perempuan sebagai cermin penulisnya. Karena itu, penulisnya mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh yang dibuatnya sebagai pengingkaran atau pernyataan diri terhadap teori Freud yang menyatakan bahwa perempuan iri terhadap kekuasaan (Zakar) laki-laki. Dalam kritik ini, para feminis percaya bahwa pembaca perempuan biasanya mengidentifikasikan dirinya atau menempatkan dirinya pada tokoh perempuan, sedangkan tokoh perempuan tersebut pada umumnya merupakan cermin penciptanya.

2.6.2.5 Kritik Sastra Feminis Lesbian

Jenis kritik sastra feminis lesbian ini hanya meneliti penulis dan tokoh perempuan saja. Ragam kritik ini masih sangat terbatas karena beberapa faktor, feminis kurang menyukai kelompok perempuan homoseksual, kurangnya jurnal-jurnal perempuan yang menulis lesbianisme, kaum lesbian sendiri belum mencapai kesepakatan tentang definisi lesbianisme, dan kaum lesbian banyak menggunakan bahasa terselubung. Pada intinya tujuan kritik sastra feminis lesbian adalah untuk mengembangkan suatu definisi yang cermat tentang makna lesbian dan untuk menentukan apakah definisi tersebut dapat diterapkan pada diri pengarang atau pada teks karyanya.

2.6.2.6 Kritik Sastra Feminis atau Etnik

Kritik sastra feminis ini berusaha mendapatkan pengakuan bagi penulis etnik dan karyanya, baik dalam kajian perempuan maupun dalam kanon sastra tradisional dan sastra feminis. Kritik ini beranjak dari diskriminasi ras yang dialami kaum perempuan yang berkulit selain putih di Amerika (Saraswati, 2003:156).

Pada penelitian ini, pisau analisis yang akan digunakan adalah kritik sastra feminis ideologi, yang akan digunakan untuk menganalisis novel *Perempuan Berkalung Sorban* dengan cara mengungkapkan penggambaran perempuan di tengah kekuasaan patriarki. Dalam kritik ini menjadi pusat perhatian adalah citra serta stereotipe seorang perempuan dan sebab-sebab mengapa perempuan sering tidak diperhitungkan bahkan nyaris diabaikan. Adapun analisis gender sebagai model analisis yang

mempertimbangkan keadilan sosial dan aspek hubungan antarjenis kelamin menjadi alat bantu.

2.6.3 Cara Kerja Kritik Sastra Feminis

Cara kerja kritik sastra feminis begitu eksplisit, yaitu dalam memahami makna suatu karya, peneliti bias menggunakan cara yang sistematis sebagai berikut.

1. Mencari kedudukan tokoh dalam masyarakatnya. Diterangkan apakah peran tokoh dalam karya sastra di masyarakat itu; sebagai ibu, janda, anak, pengusaha, dan sebagainya. Apakah tokoh perempuan modern (bekerja) atau tradisional (domestian). Kemudian apa tujuan hidup tokoh, bagaimana perilaku dan watak tokoh, dan diteliti bagaiman pendirian serta ucapan tokoh;
2. Meneliti tokoh lain, terutama tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh perempuan yang sedang diamati;
3. Mengamati sikap penulis karya yang sedang dikaji dari biografinya atau dari kritik/penghargaan yang diterimanya tentang karya-karya penulis tersebut (Isnendes, 2010:115).
4. Sistematisa cara kerja kritik sastra feminis ini akan digunakan untuk menganalisis novel *Perempuan Berkalung Sorban*.

2.7 Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Unsur Sastra

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian dan cirri-ciri sastra; jenis-jenis sastra; dan unsur-unsur pembentuk sastra.

2.7.1 Pengertian Sastra

Teeuw (2003: 45) mengemukakan bahwa batasan atau pengertian sastra itu sampai sekarang belum ada seorang pun yang berhasil memberi jawaban yang jelas atas pertanyaan apakah sastra itu. Walaupun demikian, sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan sastra. Ada pengertian yang cukup longgar atau cukup luas dan ada juga pengertian yang cukup sederhana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1001-1002), kata Sastra diartikan sebagai (1) bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai di dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari); (2) kesusastraan, karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lainnya memiliki ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan di dalam isi dan ungkapannya; ragam sastra yang dikenal umum ialah roman atau novel, cerita pendek, drama, epic dan lirik; (3) kitab suci Hindu; kitab ilmu pengetahuan; (4) kitab; pustaka; primbon (berisi ramalan, hitungan, dsb); (5) tulisan; huruf. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjiman (1990:71), yang menuliskan bahwa sastra (*literature*, Inggris, *literature*, Prancis) adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya.

Hakikat sastra adalah imajinasi dan kreativitas sehingga sastra selalu dikaitkan dengan ciri-ciri tersebut. Sastra sebagai karya imajinatif. Acuan dalam sastra adalah dunia fiksi atau imajinasi. Sastra mentransformasikan kenyataan ke dalam teks. Sastra menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia sesungguhnya, tetapi dunia yang 'mungkin' ada. Walaupun berbicara dengan acuan dunia fiksi, menurut Eastman

(Welleck & Warren, 1989:30-31), kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yaitu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Fungsi utama sastrawan adalah membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui

2.7.2 Ciri-Ciri Sastra

Selain bercirikan keindahan, sebuah karya sastra haruslah memiliki kegunaan. Dalam hal ini perlu dibahas fungsi sastra bagi manusia, yaitu sebagai kesenangan dan manfaat. Kedua sifat tersebut saling mengisi. Kesenangan yang diperoleh melalui pembacaan karya sastra bukanlah kesenangan ragawi, melainkan kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kesenangan kontemplasi yang menyenangkan, keseriusan estetis, dan keseriusan persepsi. Selain itu sastra juga memiliki fungsi katarsis, yaitu membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu sehingga terciptalah rasa lepas dan ketenangan pikiran (Welleck & Warren, 1989:34-35)

2.7.3 Jenis-Jenis Sastra

Ada tiga jenis karya sastra, yaitu puisi, prosa cerita, dan drama. Hal itu memang logis karena tiga jenis tersebutlah yang mengandung unsur-unsur kesusastraan secara dominan (fiksi, imaji, dan rekaan). Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dunia sastra akhir-akhir ini mulai terjadi pembatasan yang tipis antara khayalan dan kenyataan. Oleh karena itu, mulai dibicarakan pembagian sastra yang lain.

Dalam perkembangan sastra akhir-akhir ini, karya sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sastra imajinatif dan nonimajinatif. Sastra imajinatif mempunyai tiga ciri, yaitu isinya bersifat khayali, menggunakan bahasa yang konotatif, dan memenuhi syarat-syarat estetika seni. Sastra nonimajinatif mempunyai tiga ciri, yaitu isinya menekan unsur faktual/faktanya, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, dan memenuhi unsur-unsur estetika seni.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesamaan antara sastra imajinatif dan nonimajinatif adalah masalah estetika seni. Unsur estetika seni meliputi keutuhan (*unity*), keselarasan (*harmony*), keseimbangan (*balance*), dan fokus/pusat penekanan suatu unsur (*right emphasis*). Adapun perbedaannya terletak pada isi dan bahasanya. Isi sastra imajinatif sepenuhnya bersifat khayal/fiktif, sedangkan isi sastra nonimajinatif didominasi oleh fakta-fakta. Bahasa sastra imajinatif cenderung konotatif, sedangkan bahasa sastra nonimajinatif cenderung denotatif.

Bentuk karya sastra yang termasuk karya sastra imajinatif sebagai berikut.

1. Puisi
 - a. Epik
 - b. Lirik
 - c. Dramatik
2. Prosa terdiri atas :
 - a. Fiksi (novel, cerpen, roman)
 - b. Drama (drama prosa, drama puisi)

Adapun bentuk karya sastra yang termasuk sastra nonimajinatif sebagai berikut.

- a. Esai, yaitu karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya.
- b. Kritik, yaitu analisis untuk menilai suatu karya seni atau karya sastra.
- c. Biografi, yaitu cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain.
- d. Otobiografi, yaitu biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri.
- e. Sejarah, yaitu cerita tentang zaman lampau suatu masyarakat berdasarkan sumber tertulis maupun tidak tertulis.
- f. Memoar, yaitu otobiografi tentang sebagian pengalaman hidup saja.
- g. Catatan harian, yaitu catatan tentang seseorang dirinya atau lingkungannya yang ditulis secara teratur.

2.7.4 Unsur-unsur Pembentuk Karya Sastra

Sebenarnya sangat sulit menjelaskan unsur-unsur yang membentuk suatu karya sastra. Akan tetapi, setidaknya-tidaknya hal itu dapat didekati dari dua sisi. Pertama kita lihat dari definisi-definisi yang telah diungkapkan. Berdasarkan definisi-definisi yang sudah ada, ada unsur-unsur yang selalu disinggung. Unsur-unsur tersebut dapat dipandang sebagai unsur-unsur yang dianggap sebagai pembentuk karya sastra.

Menurut Luxemburg (1992:4-6) ada beberapa ciri yang muncul dari definisi-definisi yang telah diungkapkan. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Sastra merupakan ciptaan atau kreasi, bukan pertama-tama imitasi;
2. Sastra bersifat otonom (menciptakan dunianya sendiri), terlepas dari dunia nyata;
3. Sastra mempunyai ciri koherensi atau keselarasan antara bentuk dan isinya;

4. Sastra menghadirkan sintesa (jalan tengah) antara hal-hal yang saling bertentangan;
5. Sastra berusaha mengungkapkan hal yang tidak terungkapkan.

Sumoharjo dan Saini KM (2005:5-8) mengajukan syarat karya sastra bermutu. Syarat tersebut sebagai berikut.

1. Karya sastra adalah usaha merekam isi jiwa sastrwannya;
2. Sastra adalah komunikasi, artinya bisa dipahami oleh orang lain;
3. Sastra adalah sebuah keteraturan, artinya tunduk pada kaidah-kaidah seni;
4. Sastra adalah penghiburan, artinya mampu memberi rasa puas atau rasa senang pada pembaca;
5. Sastra adalah sebuah integrasi, artinya terdapat keserasian antara isi, bentuk, bahasa, dan ekspresi pribadi pengarangnya;
6. Sebuah karya sastra yang bermutu merupakan penemuan;
7. Karya yang bermutu merupakan (totalits) ekspresi sastrawannya;
8. Karya sastra yang bermutu merupakan karya yang pekat, artinya padat isi dan bentuk, bahasa dan ekspresi;
9. Karya sastra yang bermutu merupakan (hasil) penafsiran kehidupan;
10. Karya sastra yang bermutu merupakan sebuah pembaharuan.

Luxemburg (1992:8-10) berpendapat bahwa karya sastra harus memenuhi unsur-unsur berikut ini.

1. Karya sastra adalah teks-teks yang tidak melulu disusun untuk komunikasi praktis dan sementara waktu;

2. Karya sastra adalah teks-teks yang mengandung unsur fiksi;
3. Karya sastra adalah jika pembacanya mengambil jarak dengan teks tersebut;
4. Bahannya diolah secara istimewa;
5. Karya sastra dapat kita baca menurut tahap-tahap arti yang berbeda-beda;
6. Karena sifatnya rekaannya sastra secara langsung tidak mengatakan sesuatu mengenai kenyataan dan juga tidak menggugat kita untuk langsung bertindak;
7. Sambil membaca karya sastra tersebut kita dapat mengadakan identifikasi dengan seorang tokoh atau dengan orang-orang lain;
8. Bahasa sastra dan pengolahan bahan lewat sastra dapat membuka batin kita bagi pengalaman-pengalaman baru;
9. Bahasa dan sarana-sarana sastra lainnya mempunyai suatu nilai tersendiri;
10. Sastra sering digunakan untuk mencetuskan pendapat yang hidup dalam masyarakat.

2.8 Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Unsur Novel

2.8.1 Pengertian Novel

Istilah novel dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah novel dalam bahasa Inggris. Istilah ini semula berasal dari bahasa Itali, yaitu *novella*. *Novella* diartikan sebuah barang baru yang kecil, kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam Semi, 2003:62). Menurut Nurgiyantoro (2010:9), istilah *novella* atau *novelle* mengandung pengertian yang sama dengan istilah *noyvet* (dalam bahasa Inggris *novellette*) yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak terlalu panjang, namun tidak terlalu pendek. Novel merupakan sebuah karya

fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain. Yang kesemuanya tentu saja juga bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2010:4). Sementara itu, Jassin memberikan pengertian bahwa novel adalah cerita mengenai salah satu episode dalam kehidupan manusia, suatu kejadian yang luar biasa dalam kehidupan itu, sebuah krisis yang memungkinkan terjadinya perubahan nasib pada manusia (Faruk, 2005:265).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa novel merupakan wujud cerita rekaan (prosa fiksi) yang mengisahkan salah satu bagian nyata dari kehidupan tokoh-tokohnya dengan segala pergolakan jiwa dan melahirkan suatu konflik dalam serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun dan pada akhirnya dapat mengalihkan jalan kehidupan mereka.

2.8.2 Jenis Novel

Ada enam jenis novel (Firdaus dkk, 2000:106). Keenam jenis novel tersebut adalah (1) novel petualangan atau novel *avonturer*, (2) novel psikologi, (3) novel sosial, (4) novel politik, (5) novel bertendens, dan (6) novel sejarah. Novel petualangan atau novel *avonturer* merupakan novel yang mengisahkan pengembaraan seorang tokoh yang memperlihatkan kecintaan terhadap alam semesta. Novel psikologis adalah novel tentang masalah kejiwaan yang dialami para tokohnya. Novel sosial merupakan novel yang mengungkapkan masalah kehidupan sosial masyarakat. Novel bertendens adalah

novel yang berisi tujuan, mendidik, atau, menyampaikan pesan tertentu. Adapun novel sejarah merupakan novel yang berkaitan dengan sejarah.

Goldman dalam Faruk (2005:31) membedakan novel menjadi tiga jenis, yaitu novel idealisme abstrak, novel psikologis, dan novel pendidikan. Dalam novel idealisme abstrak sang hero penuh optimisme dalam petualangan tanpa menyadari kompleksitas dunia. Dalam novel psikologis sang hero digambarkan cenderung pasif karena keluasan kesadarannya tidak tertampung oleh dunia konvensi. Adapun dalam novel pendidikan sang hero telah melepaskan pencariannya akan nilai-nilai yang autentik, tetapi tidak menolak dunia.

2.8.3 Fungsi Novel

Fungsi novel pada dasarnya adalah untuk menghibur para pembaca. Novel pada hakikatnya merupakan sebuah cerita rekaan dan karenanya terkandung juga tujuan untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Wellek & Warren (1989:27) bahwa membaca sebuah karya fiksi adalah menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin.

Sumardjo & Saini K.M. (2000:89) mengatakan bahwa fungsi novel adalah sebagai berikut.

1. Memberi kesadaran pada pembacanya tentang suatu kebenaran;
2. Memberikan kepuasan batin, hiburan ini adalah hiburan intelektual;

3. Memberikan sebuah penghayatan yang mendalam tentang apa yang diketahui, pengetahuan ini nantinya menjadi hidup dalam sastra.

Membaca novel adalah karya seni indah dan memenuhi kebutuhan manusia terhadap naluri keindahan yang merupakan kodrat manusia. Novel di dalamnya memiliki kebebasan untuk menyampaikan dialog yang dapat menggerakkan hati masyarakat dengan kekayaan perasaan, kedalaman isi, dan kekuasaan pandangan terhadap berbagai masalah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa novel bukanlah media yang hanya menonjolkan suatu sisi kehidupan manusia.

2.8.4 Unsur-Unsur Novel

Cerita rekaan dibangun oleh unsur pokok, yaitu apa yang diceritakan dan teknik (metode) penceritaan. Isi atau materi yang diceritakan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan cara penceritaan. Bahasa yang digunakan untuk bercerita harus disesuaikan dengan isi, sifat, perasaan, dan apa tujuan cerita tersebut. Unsur-unsur yang terkait dengan isi lazim disebut struktur batin. Adapun unsur yang berhubungan dengan metode disebut unsur fisik. Unsur-unsur tersebut membangun suatu kesatuan, kebulatan dan regulasi diri atau membangun sebuah struktur dalam karya sastra. Unsur-unsur itu bersifat fungsional, artinya diciptakan pengarang untuk mendukung maksud secara keseluruhan cerita (Waluyo, 2005:136-137).

Nurgiyantoro (2010:22) mengemukakan bahwa sebuah novel merupakan sebuah totalitas maka novel terdiri dari bagian-bagian unsur. Unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya secara erat dan saling menggantungkan.

Novel dibangun dari sejumlah unsur dari setiap unsur akan saling berhubungan secara saling menentukan, yang kesemuanya itu akan menyebabkan novel tersebut menjadi sebuah karya sastra yang bermakna pada hidup. Unsur-unsur tersebut adalah intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut harus dipahami dalam upaya pengkajian karya sastra.

Unsur-unsur dalam novel, menurut Stanton dalam Sugihastuti (2002:44) adalah fakta, tema, dan sarana sastra. Fakta (*facts*) dalam sebuah cerita rekaan meliputi alur, latar, tokoh dan penokohan. Fakta cerita merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat dibayangkan peristiwanya dan eksistensinya dalam sebuah novel. Oleh karena itu, fakta cerita sering juga disebut struktur faktual (*factual structure*) atau derajat faktual (*factual level*). Sarana sastra (*literary devices*) adalah teknik yang digunakan pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita menjadi pola yang bermakna (Sugihastuti, 2002:45).

2.8.4.1 Tema

Tema adalah makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unturnya dengan cara yang sederhana. Tema bersinonim dengan ide utama (*central idea*) dan tujuan utama (*central purpose*) (Stanton dalam Sugihastuti, 2005:45) dan Nurgiyantoro, 2010:70). Tema dengan demikian, dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, atau gagasan dasar umum sebuah karya novel.

2.8.4.2 Alur (Plot) dan Pengaluran

Di dalam sebuah cerita rekaan, peristiwa-peristiwa disajikan dengan urutan tertentu, peristiwa yang diurutkan itu membangun tulang punggung cerita, yaitu alur (Panuti-Sudjiman, 1991:28).

Alur merupakan cerminan atau bahkan perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, merasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Akan tetapi, tidak dengan sendirinya semua tingkah laku kehidupan manusia boleh disebut plot atau alur (Nurgiantoro, 2010:114).

2.8.4.3 Tokoh dan Penokohan

Tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya fiksi. Melalui tokohlah seorang pengarang menyampaikan pesan, amanat, moral atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pengarang.

1. Pengertian dan Hakikat Tokoh dan Pemokohan

Cerita rekaan pada dasarnya menceritakan seseorang atau beberapa orang yang menjadi tokoh. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Dengan kata lain, tokoh cerita adalah orang yang menjadi subjek yang menggerakkan peristiwa-peristiwa cerita. Tokoh dilengkapi dengan watak atau karakteristik tertentu. Watak adalah kualitas tokoh yang meliputi kualitas nalar dan jiwa yang membedakannya dengan tokoh cerita lain. Watak itulah yang menggerakkan tokoh untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga cerita menjadi hidup.

Penyajian watak, penciptaan citra, atau pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan sebagai tokoh cerita disebut penokohan (Jones dalam Sugihastuti, 2005:50).Salah satu caranya adalah dengan penamaan.Nama, selain berfungsi untuk mempermudah penyebutan tokoh-tokoh cerita, juga menyiratkan kualitas dan latar belakang pemiliknya.

2. Pembedaan Tokoh

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan sudut pandang dan tinjauan tertentu.

a. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tambahan.Tokoh utama (*Main character, central character*) adalah tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-menerus sehingga terkesan mendominasi sebagian besar cerita.

Adapun tokoh tambahan (*peripheral character*) adalah tokoh hanya dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita dan dalam porsi penceritaan yang relatif pendek.

b. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis

Berdasarkan fungsi penampilan, tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis.Menurut Altenbernd & Lewis (Nurgiyantoro,

2010:178), tokoh protagonis adalah tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai, yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan-pandangan dan harapan-harapan pembaca.

Sebuah cerita fiksi haruslah mengandung konflik dan ketegangan, khususnya yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh penyebab terjadinya konflik disebut tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang beroposisi dengan tokoh protagonis, baik secara langsung maupun tidak langsung, fisik maupun batin.

c. Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat

Berdasarkan perwatakannya, tokoh ceritra dapat dibedakan kedalam tokoh sederhana (*simpleflet character*). Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki suatu kualitas pribadi tertentu, satu sifat/watak tertentu saja. Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, dan hanya mencerminkan satu watak tertentu. Watak yang telah pasti itu mendapat penekanan dan terus-menerus dalam cerita. Perwatakan tokoh sederhana, dapat dirumuskan hanya dengan sebuah kalimat atau sebuah frasa, misalnya, “Ia seorang lelaki yang kaya, tetapi kikir”, “Ia seorang yang miskin tetapi jujur,” atau “Ia seorang yang senantiasa pasrah pada nasib”.

Tokoh sederhana dapat saja melakukan berbagai tindakan, tetapi semua tindakannya tersebut akan kembali kepada perwatakan yang dimiliki dan telah diformulakan sebelumnya. Dengan demikian, pembaca dengan mudah

memahami watak dan tingkah laku tokoh sederhana. Tokoh sederhana mudah dipahami, lebih familier dan cenderung stereotipe.

Tokoh bulat/kompleks merupakan tokoh yang diungkapkan memiliki berbagai kemungkinan sisi kehidupan, sisi kepribadian, dan jati dirinya. Tokoh bulat dapat saja memiliki watak tertentu yang diformulasikan, tetapi ia juga dapat menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam. Bahkan, mungkin watak yang saling bertentangan dan sulit diduga. Oleh karena itu, perwatakannya pada umumnya sulit dideskripsikan secara tepat. Menurut Abrams (Nurgiyantoro, 2010:183), dibandingkan dengan tokoh sederhana, tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia yang sesungguhnya karena disamping memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia juga sering memberi kejutan.

d. Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh dalam sebuah karya fiksi, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh statis (*static character*) dan tokoh berkembang (*developing character*). Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan dan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi (Altenbernd dalam Nurgiyantoro, 2010:188). Tokoh jenis ini tampak seperti kurang terlibat dan tak terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi karena adanya hubungan antarmanusia. Tokoh statis

memiliki sikap dan watak reaktif tetap, tidak berkembang dari awal sampai akhir cerita.

Adapun tokoh berkembang merupakan tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan (dan perubahan) peristiwa atau plot yang dikisahkan. Tokoh berkembang secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial ataupun lingkungan alam yang kesemuanya itu akan memengaruhi sikap, watak, dan tingkah lakunya.

e. Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) manusia dalam realitas kehidupan yang sebenarnya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya (Altenbend dalam Nurgiyantoro, 2010:190). Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan atau penunjukan terhadap orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam suatu lembaga, atau seorang individu sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia nyata. Penggambaran tersebut bersifat tidak langsung dan tidak menyeluruh. Pembacalah yang menafsirkannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan persepsinya terhadap tokoh di dunia nyata dan pemahamannya terhadap tokoh cerita di dunia fiksi.

3. Teknik Pelukisan Tokoh

Ada beberapa pendapat yang membedakan teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya. Abrams mengatakan bahwa teknik pelukisan tokoh dengan menggunakan teknik uraian (*telling*) dan teknik ragaan (*showing*). Altenbernd membedakan menjadi teknik penjelasan (ekspositori) dan teknik dramatik.

Adapun Kenny mengatakan teknik diskursif, dramatik, dan kontekstual. Akan tetapi, walaupun berbeda istilah, secara esensial teknik tersebut tidak berbeda (Nurgiyantoro, 2010:194). Akan tetapi, pada umumnya memilih cara campuran, baik teknik langsung dalam sebuah karya. Berikut akan diuraikan teknik ekspositori dan teknik dramatik.

a. Teknik Ekspositori (Teknik Analitis)

Dalam teknik ini, pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang dihadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya (Nurgiyantoro, 2010:195).

b. Teknik Dramatik

Dalam teknik ini, pengarang tidak secara langsung mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas

yang dilakukan, baik secara verbal melalui ucapan maupun nonverbal melalui tindakan atau tingkah laku, dan juga melalui peristiwa yang terjadi (Nurgiyantoro, 2010:198).

Penampilan tokoh secara dramatik dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik-teknik tersebut diuraikan sebagai berikut.

1) Teknik Percakapan

Teknik percakapan dimaksudkan untuk menunjuk tingkah laku verbal yang berwujud kata-kata para tokoh. Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. Bentuk percakapan dalam sebuah karya fiksi, umumnya banyak, baik percakapan yang pendek maupun yang agak panjang. Tidak semua percakapan mencerminkan kedirian tokoh, tetapi percakapan yang baik, efektif, dan fungsional adalah yang menunjukkan perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan sifat kehadiran tokoh pelakunya.

2) Teknik Tingkah Laku

Teknik tingkah laku menyorot pada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. Apa yang dilakukan orang dengan wujud tindakan dan tingkah laku, dalam banyak hal dapat dipandang sebagai menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya.

3) Teknik Pikiran dan Perasaan

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang terlintas dalam pikiran dan perasaan, serta apa yang sering dipikir dan dirasakan oleh tokoh, dalam banyak hal akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Bahkan, pada hakikatnya, “tingkah laku” pikiran dan perasaanlah yang diejawantahkan yang menjadi tingkah laku verbal dan nonverbal. Perbuatan dan kata-kata merupakan perwujudan konkret tingkah laku pikiran dan perasaan. Teknik pikiran dan perasaan dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan tingkah laku. Artinya penuturan itu sekaligus untuk menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh.

4) Teknik Arus Kesadaran

Teknik arus kesadaran berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan. Keduanya tidak dapat dibedakan secara terpisahkan. Bahkan, dianggap sama karena sama-sama menggambarkan tingkah laku batin tokoh. Arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh tempat tanggapan indera bercampur dengan kesadaran dan ketaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi-asosiasi acak (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2010:206).

5) Teknik Reaksi Tokoh

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain, dan sebagainya yang berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penampilan yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya.

6) Teknik Reaksi Tokoh Lain

Reaksi tokoh lain yang dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh lain terhadap tokoh utama atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Dengan kata lain penilaian kedirian tokoh utama oleh cerita tokoh-tokoh cerita yang lain dalam sebuah karya. Reaksi tokoh juga merupakan teknik penokohan untuk menginformasikan kedirian tokoh kepada pembaca. Tokoh-tokoh lain itu pada hakikatnya melakukan penilaian atas tokoh utama untuk pembaca.

7) Teknik Pelukisan Latar

Pelukisan suasana latar lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. Keadaan latar tertentu dapat menimbulkan kesan di pihak pembaca. Misalnya, suasana rumah yang bersih, teratur, rapih, akan menimbulkan kesan bahwa pemilik rumah itu sebagai orang yang mencintai kebersihan dan lingkungan, mempunyai sifat teliti dan teratur. Sebaliknya, suasana rumah yang kotor,

berantakan dan semrawut akan memberikan kesan kepada pemiliknya yang kurang lebih sama dengan keadaan itu. Pelukisan keadaan latar sekitar tokoh secara tepat akan mampu mendukung teknik penokohan secara takut.

8) Teknik pelukisan fisik

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, atau paling tidak, pengarang sengaja mencari dan menghubungkan adanya keterkaitan itu, misalnya, bibir tipis menyaran pada sikap ceriwis dan bawel, rambut lurus menyaran pada sifat tak mau mengalah, pandangan mata tajam, hidung agak mendongak, dan lain-lain menyaran pada sifat-sifat tertentu. Tentu saja hal itu berkaitan dengan pandangan (budaya) masyarakat yang bersangkutan

2.8.4.4 Latar

Unsur penting lain dalam menganalisis sebuah novel adalah latar (*setting*). Latar sering disebut sebagai atmosfer karya sastra (novel) yang turut mendukung masalah, tema, alur, dan penokohan. Oleh karena itu, latar merupakan salah satu fakta cerita yang harus diperhatikan, dianalisis, dan dinilai.

Latar atau setting adalah keterangan, petunjuk, atau pengaturan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra (Panuti-Sudjiman, 1991:44). Menurut Kenny dalam Sugihastuti (2005:54), latar meliputi penggambaran lokasi geografis, termasuk fotografi, pemandangan, sampai

pada perincian perlengkapan dalam sebuah ruangan; pekerjaan atau kesibukan sehari-hari para tokoh; waktu berlakunya kejadian, masa sejarah, musim terjadinya; lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional para tokoh berdasarkan perincian tersebut.

2.9 Kelayakan Materi Pelajaran Sastra Indonesia

Novel yang sarat dengan nilai pendidikan dan sosial tentunya bisa digunakan sebagai materi pembelajaran asalkan memenuhi kelayakan materi pelajaran. Badan Standar Pendidikan Nasional pada tahun 2006 mengidentifikasi materi pelajaran yang baik untuk menunjang kompetensi dasar harus mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi

1. potensi peserta didik,
2. relevansi dengan karakter daerah,
3. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik,
4. bermanfaat bagi peserta didik,
5. struktur keilmuan,
6. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran, dan
7. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

Selain itu, pemilihan materi ajar perlu mempertimbangkan unsur dalam materi yang meliputi isi, bahasa, dan unsur lainnya yang meliputi masalah waktu dan kebutuhan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ping (2011) bahwa pemilihan materi ajar harus

mempertimbangkan panjang artikel, ayat, kompleksitas bahasa, kepadatan informasi, materi dan isi subjek, waktu tersedia dan tingkat perkembangan peserta didik.

Sehubungan dengan kelayakan materi pelajaran, Harjana (1985:2) menyatakan (1) bahwa pembelajaran sastra hendaknya memberikan pelajaran moral, yaitu bahan pembelajaran sastra yang digunakan hendaknya mengandung hal-hal yang mengarah pada pembelajaran moral sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari hasil membaca karya sastra tersebut dan (2) pengarang memberikan ketepatan dalam wujud pengungkapan, yaitu pengarang memiliki kemampuan menuangkan ide ceritanya secara jelas dan rinci dalam bentuk karangan.

2.10 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter

Karakter lebih bersifat subjektif sebab berkaitan dengan struktur antropologis manusia dan tindakannya dalam memaknai kebebasannya sehingga ia mengukuhkan keunikannya berhadapan dengan orang lain (Aqib, 2011: 38). Sementara itu, pendidikan senantiasa berkaitan dengan dimensi sosialitas manusia (Aqib, 2011: 39).

Karakter seseorang sebagian besar dibentuk oleh pendidiknya (Muhammad Nuh). Untuk membentuk pribadi ini, mutlak dibutuhkan pendidikan yang berkualitas, yaitu pendidikan karakter. Walaupun sejak pendidikan paling dini, kurikulum pendidikan di Indonesia sebenarnya mengajarkan karakter bangsa sesuai dengan jiwa Pancasila, seperti pada mata pelajaran PPKn dan agama. Namun sayangnya, pengajaran yang dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu tidak cukup membuat peserta didik mengedepankan karakter dalam kehidupan sehari-hari.

2.10.1 Pengertian Pendidikan Karakter

Secara singkat, pendidikan karakter bisa diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain dalam dunia (Aqib, 2011: 38). Pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi yang berkeutamaan.

Pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogi memiliki tujuan agar setiap pribadi semakin menghayati individualitasnya, mampu menggapai kebebasan yang dimilikinya sehingga ia dapat semakin bertumbuh sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab (Aqib, 2011: 38). Bahkan, ia memiliki tingkat tanggung jawab moral integral atas kebersamaan hidup dengan yang lain di dunia.

Pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogi memberikan tiga matra penting Setiap tindakan edukatif maupun campur tangan intensional bagi sebuah kemajuan pendidikan (Aqib, 2011: 40). Matra itu adalah individu, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pembaruan dalam dunia pendidikan serta penerapan program pendidikan karakter dalam setiap lembaga pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari tiga matra itu.

Pendidikan karakter di sekolah mencoba memetakan momen-momen khusus yang terjadi di dalam lingkup pergaulan di sekolah yang dapat menjadi tempat praktis pendidikan karakter itu dapat dilaksanakan. Tempat-tempat itu antara lain, gagasan tentang sekolah sebagai wahana aktualisasi nilai, wiyata mandala pada masa orientasi

kelas, manajemen kelas, penegakan disiplin di kelas, pendampingan perwalian, pendidikan agama, pendidikan jasmani, pendidikan estetika, pengembangan kurikulum secara integral, dan pendidikan kehendak melalui pengalaman.

2.10.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Aqib dan Sujak, 2011: 11).

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter.
2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.
3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter.
4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.
5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik.
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membangun mereka untuk sukses.
7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada pesera didik.
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan serta pada nilai dasar yang sama.
9. Adanya membangun kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter.

10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter.
11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.

2.10.3 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

Penyelenggaraan pendidikan karakter dapat dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu pembelajaran, manajemen sekolah, dan ekstrakurikuler. Langkah-langkah pendidikan karakter meliputi perancangan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut.

2.10.3.1 Perancangan

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap perancangan antara lain sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan karakter peserta didik direalisasikan dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu terpadu dengan pembelajaran, manajemen sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan di sekolah.
3. Mengembangkan rancangan pelaksanaan setiap kegiatan di sekolah (tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar, pendekatan pelaksanaan, evaluasi).
4. Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan karakter di sekolah.

2.10.3.2 Implementasi

Pendidikan karakter di sekolah dapat dilaksanakan dalam tiga kelompok kegiatan.

1. Pembentukan karakter yang terpadu dengan pembelajaran pada mata pelajaran

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, menginternalisasi nilai-nilai, dan menjadikan perilaku.

Dalam struktur kurikulum sekolah, pada dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi-materi yang berkaitan dengan karakter. Secara substantif, setidaknya terdapat dua mata pelajaran yang terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (PKn). Kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung mengenalkan nilai-nilai yang sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai.

2. Pendidikan Karakter Secara Terpadu melalui Manajemen Sekolah

Dalam manajemen terkandung pengertian pemanfaatan sumber daya untuk tercapainya tujuan. Sumber daya adalah unsur-unsur dalam manajemen, yaitu manusia (*man*), bahan (*material*), mesin/peralatan (*machines*), metode/cara kerja

(*methods*), modal uang (*money*), dan informasi (*information*). Sumber daya bersifat terbatas sehingga tugas manajer adalah mengelola keterbatasan sumber daya secara efisien dan efektif agar tujuan tercapai.

Proses manajemen adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari membuat perencanaan dan pembuatan keputusan (*planning*), mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki (*organizing*), menetapkan kepemimpinan untuk menggerakkan sumber daya (*actuating*), dan melaksanakan pengendalian (*controlling*). Dalam konteks dunia pendidikan, yang dimaksudkan dengan manajemen pendidikan/sekolah adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan karakter memerlukan pengelolaan yang mengarah pada pembentukan karakter dalam bentuk pendidikan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara memadai.

3. Pendidikan Karakter Secara Terpadu melalui Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.

Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Misi ekstrakurikuler adalah (1) menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka; (2) menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kemampuan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok.

Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karier. Dalam fungsi pengembangan, kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Dalam fungsi sosial, kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Dalam fungsi rekreatif, kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Dalam fungsi persiapan, kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan kesiapan karier peserta didik yang sangat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan bakat.